



# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2016-2021**

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.....	6
2.2 Sumber Daya SKPD.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	20
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	22
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	24
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN.....	23
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	23
4.2 Sasaran Jangka Panjang Perangkat Daerah.....	27
BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	39
BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	62
BAB VIII    PENUTUP.....	64

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga penyusunan dan penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016–2021 dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016–2021, akan dijadikan acuan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar ini juga mempedomani hasil-hasil pelaksanaan pembangunan serta memperhatikan peluang dan tantangan serta potensi sumber daya yang ada untuk pembangunan lima tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dan penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar ini berguna sebagai acuan bagi proses peningkatan kualitas pelayanan dan upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tanah Datar.

Batusangkar, 2018

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR

**Drs. FAISAL, A**

NIP. 19610704 198503 1 009

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Renstra Perangkat Daerah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan Perubahan atas Permendagri 54 tahun 2010.

Fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melewati tahapan sebagai berikut;

- (a) Persiapan penyusunan Renstra, meliputi; penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- (b) Penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah, melewati tahapan sebagai berikut; perumusan rancangan Renstra dan Penyajian rancangan renstra;
- (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan pada RPJMD; dan
- (d) Penetapan renstra Perangkat Daerah, berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan renstra Perangkat Daerah,

Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021 mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tertuang pada Kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah untuk mendukung misi ke 2 (dua) yang berbunyi “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas dan berkarakter”

#### 1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 );

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah disepakati bersama sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu dan menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

### *BAB I : Pendahuluan*

Berisi Uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

### *BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.*

Memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya dan mengulas tentang Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

### *BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.*

Memuat dan mengungkapkan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan Perangkat Daerah, visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis

### *BAB IV : Tujuan dan Sasaran.*

Berisi uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

### *BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan.*

Berisikan tentang Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

### *BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif*

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

### *BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.*

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### *BAB VIII : Penutup.*



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN OPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar

1. Kepala Dinas.

Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan memimpin

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat. Sekretariat terdiri:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

### 3. Bidang

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar terdapat tiga bidang, yaitu :

- 1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat.
  - b. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, dan
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- 2) Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
  - a. Seksi Kelembagaan dan Kapasitas Perangkat Desa.
  - b. Seksi Pembinaan Desa dan Aset, dan
  - c. Seksi Kerjasama Desa.
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan.
  - b. Seksi Keluarga Berencana, dan
  - c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 4) Unit Pelaksana Teknis ( UPT ).
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai gambaran Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat sebagai berikut :



## 2.2 Sumber Daya SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tercatat secara keseluruhan berjumlah 43 orang (pegawai kantor dan lapangan), sementara pegawai yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada susunan organisasi di atas adalah sebagai berikut:

NO	Jabatan	Eselon
1	Kepala Dinas	II.a
2	Sekretaris	III.a
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	III.b
4	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	III.b
5	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	III.b
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a
7	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	IV.a
8	Kasubag Keuangan	IV.a
9	Kasi Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat	IV.a
10	Kasi Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG	IV.a
11	Kasi Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	IV.a
12	Kasi Kelembagaan dan Kapasitas Perangkat Desa	IV.a
13	Kasi Pembinaan Desa dan Aset	IV.a
14	Kasi Kerjasama Desa	IV.a
15	Kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	IV.a
16	Kasi Keluarga Berencana \	IV.a
17	Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	IV.a

Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

NO	Bagian / Bidang	Jumlah
1	Sekretariat	15
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5
3	Bidang Pemerintahan Desa	4
4	Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	5

Dalam pelaksanaan tugas Program Nasional Keluarga Berencana perlu adanya petugas yang handal di lapangan guna melakukan penyuluhan KB pada masyarakat, dengan nama Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dimana status kepegawaiannya terhitung awal Tahun 2018 telah dialihkan menjadi Pegawai Pusat.

Berikut jumlah pegawai petugas penyuluh lapangan keluarga berencana pada masing-masing Kecamatan, berikut disampaikan data petugas PLKB pada masing-masing Kecamatan :

No	Kecamatan	PLKB/PLK
1	Kecamatan Lima Kaum	4
2	Kecamatan Tanjung Emas	3
3	Kecamatan Batipuh	4
4	Kecamatan Batipuh Selatan	3
5	Kecamatan Pariangan	3
6	Kecamatan Padang Ganting	2
7	Kecamatan Rambatan	4
8	Kecamatan Sungayang	3
9	Kecamatan Salimpaung	3
10	Kecamatan Tanjung Baru	3
11	Kecamatan Lintau Buo	4
12	Kecamatan Lintau Buo Utara	1
13	Kecamatan Sungai Tarab	4
14	Kecamatan X Koto	5

Disamping itu untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pelayanan kepada masyarakat telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana diantaranya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Gedung Dinas	1 unit	
2.	Gedung UPT Kecamatan	14 unit	
3.	Mobil	7 unit	
4.	Sepeda Motor	60 unit	
5.	Komputer PC	4 unit	
6.	Lap Top / Note Book	38 unit	
7.	Printer	42 unit	







#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah gabungan dari beberapa instansi sebelumnya yakni Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang kemudian menjdai beberapa Bidangf. Masing-masing Bidang tersebut secara kontekstual adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat.

Kurangnya personil untuk memempati possisi dan tugas disetiap Nagari, yakni 41 orang petugas fungsional yang mempunyai wilayah kerja jadi tidak proporsional untuk bisa melayani masyarakat sesuai kondisi situasi serta aksesibilitas nagari yang beragam. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) belum optimal dalam tercapainya sinergitas kinerja antara perencana dan pimpinankgiatan, koodinator kegiatan serta penanggung jawab kegiatan dengan tenaga UPTD dan fungsional di lapangan dan bagi tenaga lapangan belum memenuhi standar kompetrensi yang sesuai untuk berkoordinasi dengan Camat dan UPTD lainnya.

Salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga Pemerintahah Daerah sebagai fasilitator dan katalisastor pembangunan masyarakat perlu memberikan stumulan kepada masyarakat.

Bentuk partisipasi tersebut dapat dilihat dari kontribusi dana masyarakat yang terserap dalam pembangunan, jumlah

kelompok masyarakat yang aktif dan kehadiran masyarakat dalam menghadiri pertemuan dan kegiatan sosial lainnya.

Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini disebabkan antara lain :

1. Persepsi anggota masyarakat yang menganggap mereka sebagai objek pembangunan padahal tujuan pembangunan partisipatif adalah mereka.
2. Sifat kegotong royongan yang telah ada dalam jiwa masyarakat muncul tergantung dengannpola kepemimpinan yang ada sehingga diperlukan tokoh panutan dalam lingkungan masyarakat atau sikap skeptis masyarakat terhadap pimpinan perlu ditumbuhkan kembali.
3. Cerminan kepemimpinan demokratis sangat diharapkan oleh masyarakat, kurangnya data dan informasi yang diupdeting setiap waktu sehingga setiap tindakan perencanaan dan evaluasi dapat dilaksanakan sebaik mungkin.
4. Masih lemahnya SDM dari perangkat nagari sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dinasgari banyak terjadi hambatan-hambatan.

Untuk pelayanan dibidang Keluarga Berencana yang mempunyai tugas untuk menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, program pelayanan masyarakat dan Keluarga Berencana dan pembinaan masyarakat dalam membangun Keluarga Sejahtera. Untuk menunjang tugas-tugas tersebut telah dilaksanakan kegiatan selama 3 tahun terakhir ini dimana pola pembangunan masih mengacu kepada BKKBN Provinsi dan Pusat.

Secara umum tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar cukup baik namun belum memuaskan, hal disebabkan antara lain :

1. Tingkat kesertaan ber KB belum maksimal terutama partisipasi pria dalam ber KB rendah.
2. Disebagian daerah masih terdapat angka perkawinan dibawah umur karena kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap kesehatan reproduksi remaja.

3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan Tribina.
4. Masih banyak terdapat keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan atau pra sejahtera KS 1 alasan ekonomi.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

###### Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Terbatasnya kualitas kemampuan Pemerintah Nagari dalam mengefektifkan pengelolaan Pemerintahan	Pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat	Masih rendahnya SDM
2.	Terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam lokal	Pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal	Masih rendahnya SDM
3.	Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Masih rendahnya pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan rendahnya partisipasi pria dalam ber KB	Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam ber KB
4.	Kesehatan Reproduksi	Masih rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan Reproduksi	Pemahaman tentang KB
5.	Pengembangan/Pemberdayaan institusi masyarakat dalam program KB	Belum optimalnya pengembangan/pemberdayaan institusi masyarakat dalam program KB	







Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Profil/ Misi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menyiapkan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk	Belum maksimalnya pelayanan tentang KB	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana	Tersedianya sarana dan prasarana
2.	Peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat	Masih rendahnya SDM	Tersedianya sarana dan prasarana dan kegiatan untuk peningkatan SDM

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

#### 1. Gambaran pelayanan perangkat daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dengan tugas adalah melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Perda dimasud Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mempunyai 3 bidang antara lain :

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.



2. Bidang Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat desa, pembinaan desa dan aset serta kerjasama desa.
3. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat Perangkat Daerah ini juga dibentuk 1 Sekretariat Dinas dan 12 Seksi dan Kasubagnya Serta ditambah dengan petugas Fungsional di Kecamatan.

## 2.Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintah dimana BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan, dengan tujuan “ Mencapai Penduduk Seimbang Melalui Upaya Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) dan Perwujudan Keluarga Berualitas “

Terkait dengan intergrasi penduduk dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk selain itu pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan sumber daya manusia dimana pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata.

### 3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sasaran Jangka Menengah dari renstra Perangkat Daerah provinsi dan Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana
  2. Menyiapkan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.
  3. Meningkatnya peranserta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- ### 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah.

Kebijakan dan Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar mencakup kebijakan dan strategi struktur ruang yaitu kebijakan berkaitan dengan hirarki pusat-pusat kegiatan dan prasarana wilayah dan kebijakan dan strategi pola ruang yaitu kebijakan dan strategi terhadap kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mencakup diantaranya adalah Penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam kerangka tata ruang wilayah kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat yang telah dirumuskan diantaranya adalah Menetapkan dan mengembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Tanah Datar untuk melayani nagari maupun jorong yang tidak ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

### Penentuan Isu-isu Strategis.

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Keluarga Berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
2. Terbatasnya kualitas kemampuan pemerintahan nagari dalam mengefektifkan pengelolaan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat nagari.
3. Terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam lokal dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan.

4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang agama, adat dan budaya.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar secara hirarkis memuat tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan. Selanjutnya disusun program dan kegiatan untuk dapat mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah datar

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama lima tahun sebagai berikut:





## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah dengan menentukan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional. Kebijakan disini adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Program disini adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan disini adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan mencakup sebagai berikut :















## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Berupa kegiatan penyediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelaksanaan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h. Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Penyediaan alat-alat kebersihan kantor
- l. Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
- m. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
- n. Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Pengadaan Gedung Kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor

- c. Pengadaan Meubiler
  - d. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala meubiler
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
  - h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor
  - i. Pemeliharaan rutin/berkala perelatan gedung/kantor
  - j. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
  - k. Pembangunan Turap dan Pagar
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal.
  4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dengan kegiatan Pengadaan pakaian dinas
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan dan Capaian Kinerja dan keuangan.  
Dengan kegiatan antara lain :
    - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
    - c. Penyusunan perencanaan tahunan
  6. Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan adalah :
    - a. Penyusunan dan pengumpulan data /informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
  7. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan antara lain :
    - a. Pembinaan Keluarga Berencana
    - b. Penyelenggaraan bantuan operasional KB
    - c. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
    - d. Desiminasi kebijakan pengendalian penduduk
    - e. Pelayanan KIE
  8. Program Pelayanan Kontrasepsi; dengan kegiatan antara lain :
    - a. Pelayanan pemasangan Kontrasepsi
  9. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan:
    - a. Memperkuat dukungan dengan partisipasi masyarakat
    - b. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
  10. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, dengan kegiatan antara lain
    - a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.
  11. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dengan kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan
  12. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR
13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Evaluasi RPJM dan RKP Nagari
  - b. Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan desa
  - c. Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa
  - d. Pemberian stimulasi pembangunan desa
  - e. Pembinaan Nagari berprestasi
  - f. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
  - g. Sosialisasi dan pembinaan kelompok pemberdayaan masyarakat
  - h. Pembinaan LPM
  - i. Peningkatan dan Fasilitasi operasional profil dan data nagari
  - j. Pembinaan Nagari Percontohan
  - k. Koordinasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata Proses Pembelajaran Masyarakat ( KKN-PM )
14. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
15. Program Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat pedesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembinaan dan Gelar Teknologi tepat Guna ( TTG )
  - b. Pembinaan Usaha Mikro kecil dan menengah
  - c. Fasilitasi permodalan bagi usahamikro kecil dan menengah di pedesaan
  - d. Fasilitasi dan pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat pedesaan
  - e. Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan
  - f. Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumnag)
16. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Sosialisasi dan temu kader Posyandu
  - b. Sosialisasi, pembinaan dan orientasi PMT-AS
  - c. Pembinaan dan Fasilitasi kelembagaan masyarakat
  - d. Fasilitasi pembangunan perbasis pemberdayaan masyarakat
  - e. Penyelenggaraan Pelatihan tenaga teknis kemasyarakatan
17. Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
  - b. Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan



- c. Penilaian Kompetensi Wali Nagari
  - d. Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten Tanah Datar
  - e. Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari
  - f. Penilaian BPRN
  - g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18. Program Kerjasama pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
    - a. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha
    - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  19. Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pengelolaan Aset nagari
  20. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
    - a. Kajian Peraturan Perundang-Undangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
    - b. Sosialisasi Produk Hukum
  21. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
  22. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
  23. Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan, dengan kegiatan antara lain Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan periode rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini.







































**BAB. VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021

N O	Indikator	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
I	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,9	2,7	2,5	2,4	2,3	2,1	2,1
	Ratio Akseptor KB	68,86	73,87	77,00	78,65	79,02	79,50	79,50
	Jumlah kelompok PPKBJ, Sub PPKBJ, BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang mandiri	42	56	70	84	98	112	112
	Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	12,5	11,50	10,58	9,25	8,04	8,00	8,00
	Jumlah kelompok PIK remaja/Mahasiswa yang aktif	6 klp	8 klp	14 klp	18 klp	22 klp	26 klp	26 klp
	Jumlah kelompok BKB Holistik Integratif	4 klp	5 klp	8 klp	11 klp	14 klp	17 klp	17 klp
	Jumlah remaja yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	2.000 org	3.400 org	2.500 org	2.800 org	3.000 org	3.500 org	3.500 org
II	Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
	persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	70	75	75	78	80	85	85
	Persenta kapasitas lembaga kemasyarakatan kader pemberdayaan masyarakat	80	85	85	87	88	89	89
	Persentase kelompok ekonomi perempuan yang aktif	77 %	80 %	80 %	81 %	83 %	86 %	86 %
	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat	75 klp	75 klp	75 klp	90 klp	100 klp	100 klp	100 klp
	Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG)	6 klp	8 klp	10 klp	12 klp	13 klp	14 klp	14 klp
III	Pemerintahan Desa							
	Jumlah tatakelola pemerintahan yang baik	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari

	Jumlah tatakelola pemerintahan yang bersih	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## BAB VIII

### PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis 2016-2021 maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar telah mempunyai acuan dalam arah pembangunan lima tahun kedepan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Jadi visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi.
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.





Anggaran Dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar ( dalam ribuan )

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Ke					Rata Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak langsung	5.078.978	5.731.860	6.105.364	6.392.036	6.782.548	4.925.883	5.547.103	5.830.644	6.089.802	6.559.467	97 %	97 %	96 %	95 %	98 %	340.714	326.716
Belanja langsung :	2.670.810	4.132.205	9.590.945	13.374.606	9.023.885	2.508.539	3.761.880	7.211.903	11.918.290	8.235.115	94 %	91 %	75 %	89 %	91 %	1.270.615	1.145.315
- Belanja Pegawai	479.850	546.175	1.739.985	960.225	29.354	450.575	531.200	1.492.840	911.230	29.334	94 %	97 %	86 %	95 %	99 %	( 90.099 )	( 82.248 )
- Belanja Barang dan jasa	1.097.459	2.608.280	5.576.735	7.482.731	7.954.406	1.072.094	2.321.755	3.836.577	6.266.316	7.239.848	98 %	89 %	69 %	84 %	91 %	1.371.389	1.233.550
- Belanja Modal	1.093.501	977.750	2.274.225	4.931.650	1.040.125	985.870	908.925	1.882.486	4.740.743	965.933	90 %	93 %	83 %	96 %	93 %	( 10.675 )	( 3.987 )
Jumlah	7.749.789	9.864.065	15.696.310	19.766.643	15.806.434	7.434.422	9.308.983	13.042.548	18.008.093	14.794.582	96 %	94 %	83 %	91 %	94 %	1.611.329	1.472.032



### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi :Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah				
No	Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya	-	-	-
2.	Misi 2. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman, sehat,cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ASBS-SBK Program : 1. Keluarga Berencana 2. Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Pelayanan Kontrasepsi 4. Pembinaan peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri 5. Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga Balita 6. Peningkatan keberdayaan Masyarakat pedesaan 7. Pengembangan lembaga Ekonomi pedesaan 8. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa 9. Pembinaan dan Posyandu-PADU 10. Pengembangan model Operasional BKB- tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak	1. Masih rendahnya Pemahaman Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2. Masih rendahnya Pemahaman remaja Tentang kesehatan reproduksi 3. Belum optimalnya Pengembangan/Pemberdayaan Institusi masyarakat Dalam program KB 4. Perlunya peningkatan dan pelayanan masyarakat	1. Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang KB 2. Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana di Pedesaan	1. Tersedianya anggaran 2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang

	<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Pengembangan pusat Pelayanan informasi Dan konseling KRR</li> <li>12. Peningkatan Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS</li> <li>13. Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat</li> <li>14. Peningkatan peran Perempuan dipedesaan</li> <li>15. Pengembangan data dan Informasi</li> <li>16. Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> </ul>			
3.	<p>Misi 3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</li> <li>2. Pendidikan Politik Masyarakat</li> <li>3. Penataan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>4. Kerjasama pembangunan</li> <li>5. Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa</li> </ul>	1. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari	1. Masih rendahnya SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya anggaran</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang</li> </ul>
4.	<p>Misi 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur wilayah Yang berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan</p>	-	-	-
5.	<p>Misi 5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam</p>	-	-	-

### 3.3 Telaahan Renstra K.L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

#### Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	Belum maksimalnya peran dan pemanfaatan media promosi dan KIE	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang KB dan isu kependudukan	Tersedianya Sarana dan prasarana dan anggaran
2.	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Buatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang KB dan isu kependudukan	Tersedianya Sarana dan prasarana dan anggaran
3.	Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet Need) masih tinggi	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang KB dan isu kependudukan	Tersedianya Sarana dan prasarana dan anggaran
4.	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang KB dan isu kependudukan	Tersedianya Sarana dan prasarana dan anggaran
5.	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi yang masih tinggi	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang KB dan isu kependudukan	Tersedianya Sarana dan prasarana dan anggaran

TABEL  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD  
Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)
1	Terwujudnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri	Meningkatnyaperan serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	70 %	75 %	75 %	78 %	80 %	85 %
			Persentase kapasitas lembaga kemasyarakatan kader pemberdayaan masyarakat	80 %	85 %	85 %	87 %	88 %	89 %
			Persentase kelompok ekonomi perempuan yang aktif	77 %	80 %	80 %	81 %	83 %	86 %
		Meningkatnya pengembangan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat	75 klp	75 klp	75 klp	90 klp	100 klp	100 klp
			Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG)	6 klp	8 klp	10 klp	12 klp	13 klp	14 klp
2	Terwujudnya keluarga berkualitas melalui pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	Rata-rata anak perkeluarga	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	2.1
			Rasio Akseptor KB	68.86	73,87	77.00	78.65	79.02	79.50
			Kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi ( unneed need )	12.5	11.5	10.88	9.25	8.04	8.00



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Badandi Kitabullah.			
MISI 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
-	-	-	-
MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan ABS-SBK			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1. Terwujudnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri	Sasaran 1.1 1.Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Strategi 1.1 1.Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan 2.Mengembangkan manajemen pembangunan partisipatif 3.Memantapkan sistem pendataan profil nagari 4.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan 5.Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan.	Arah kebijakan 1.1 1.Penguatan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2.Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif melalui forum Musrenbang 3.Pemantapan sistem pendataan profil nagari sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di Nagari 4.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan 5.Pengembangan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

		<p>6.Meningkatkan pemahaman nilai-nilai budaya dan penguatan lembaga adat</p> <p>7.Meningkatkan ketahan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>8.Memberdayakan kaum perempuan dalam pembangunan</p> <p>9.Meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat</p>	<p>6.Pemantapan nilai-nilai budaya dan penguatan lembaga adat, dalam rangka memperkuat hubungan dan interaksi sosial masyarakat Nagari</p> <p>7.Pemantapan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga</p> <p>8.Pemberdayaan perempuan dalam menunjang pembangunan daerah</p> <p>9.Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya kelompok masyarakat adat dan masyarakat kurang mampu dan penderita HIV/AIDS.</p>
	<p>Sasaran 1.2</p> <p>3.Meningkat pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan</p>	<p>Strategi 1.2</p> <p>1.Meningkatkan keberdayaan keluarga miskin dibidang ekonomi</p> <p>2.Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro</p> <p>3.Mengembagkan lembaga keuangan mikro Nagari</p> <p>4.Mengembangkan usaha ketahanan pangan masyarakat</p>	<p>Arah kebijakan 1.2</p> <p>1.Peningkatan keberdayaan keluarga miskin dibidang ekonomi</p> <p>2.Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro</p> <p>3.Pengembangan lembaga keuangan mikro Nagari</p> <p>4.Pengembangan usaha ketahanan pangan masyarakat</p>

		<p>5.Meningkatkan peran serta aktif masyarakat Nagari dalam pengelolaan SDA yang ada</p> <p>6.Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan</p> <p>7.Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana skala kecil sesuai kebutuhan masyarakat</p> <p>8.Memasyarakatkan dan mendayagunakan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi SDA yang berwawasan lingkungan</p>	<p>5.Peningkatan peran serta aktif masyarakat Nagari dalam pengelolaan SDA yang ada, melalui pemberian akses yang seluas luasnya bagi masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA lokal sesuai kebutuhan masyarakat</p> <p>6.Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan, melalui pengembangan fasilitasi lingkungan serta mendayagunakan kearifan nilai budaya lokal dalam pelestarian lingkungan hidup</p> <p>7.Pengembangan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana skala kecil sesuai kebutuhan masyarakat, agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas prasarana dan sarana yang telah dibangun.</p> <p>8.Pemasyarakatkan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi SDA yang berwawasan lingkungan.</p>
<p>Tujuan 2 :</p> <p>Terwujudnya keluarga berkualitas melalui pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga.</p>	<p>Sasaran 2.1</p> <p>1.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB</p>	<p>Strategi 2.1</p> <p>1.Meningkatkan advokasi kepada pemangku kepentingan</p> <p>2.Menjamin ketersediaan data kependudukan keluarga berencana dan pemanfaatan parameter kependudukan</p> <p>3.Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan kependudukan dan</p>	<p>Arah kebijakan 2.1</p> <p>1.Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan KB dan KR</p>



		keluarga berencana 4.Menserasikan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana	
	Sasaran 2.2 1.Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB	Strategi 2.2 1.Meningkatkan kemitraan dalam program kependudukan dan keluarga berencana 2.Meningkatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana keluarga berencana 3.Meningkatkan perencanaan dan pengembangan SDM aparatur	Arah kebijakan 2.2 1.Menyiapkan dukungan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan KB dan KR
	Sasaran 2.3 1.Meningkatnya pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi	Strategi 2.3 1.Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi program kesehatan reproduksi remaja 2.Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi kepada remaja	Arah kebijakan 2.3 1.Advokasi dan KIE program kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi kepada kelompok remaja.
		3.Meningkatkan upaya promosi pendewasaan usia kawin pertama perempuan 4.Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	2.Advokasi dan KIE program kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi kepada kelompok remaja.

	Sasaran 2.4 1.Meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga	Strategi 2.4 1.Meningkatkan advokasi kepada pemangku kepentingan 2.Meningkatkan sosialisasi dan promosi tentang ketahanan keluarga 3.Penguatan program BKB, BKR, BKL dan UPPKS 4.Memfasilitasi kelompok masyarakat peduli KB di Nagari dan Jorong	Arah kebijakan 2.4 1.Penguatan kelembagaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga ditingkat Nagari dan Jorong
		5.Menyiapkan SDM pengelola kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS melalui pendidikan dan pelatihan	2.Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan lansia serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
MISI 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 3. Terselenggaranya pemerintahan desa/nagari yang baik, bersih	Sasaran 3.1 1.Tertatanya kelembagaan desa/nagari sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.	Strategi 3.1 1.Mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan Peraturan yang akan diterbitkan.	Arah kebijakan 3.1 1.Pelaksanaan review, koordinasi dengan pihak terkait sehubungan penerbitan peraturan daerah.
	Sasaran 3.2 1.Meningkatnya kualitas pengelolaan adminstrasi keuangan desa.	Strategi 3.2 1.Melaksanakan review, koordinasi setiap kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan desa.	Arah kebijakan 3.2 1.Pelaksanaan review, koordinasi setiap kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan desa.

MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
-	-	-	-
MISI 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Daerah.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
-	-	-	-

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASTARAKAT, DESA**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PADA TAHUN												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2016	Rp (000)	Tahun 2017	Rp (000)	Tahun 2018	Rp (000)	Tahun 2019	Rp (000)	Tahun 2020	Rp (000)	Tahun 2021	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				17	18	19	
	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD		Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan administrasi Perkantoran yang ditata		499.989.500		422.989.900		465.288.890		511.817.779		572.999556,90		629.299.512,59		
				Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	100 %	5.000.000	100 %	4.326.000	750 bh	4.500.000	900 bh	4.500.000	900 bh	4.500.000	1.050 bh	5.100.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Kwh listrik, Volume air yang digunakan dan jumlah tagihan telepon	100 %	20.000.000	1 thn	20.000.000	16,99 kwh listrik, 5,44 M3 air, 1 thn tagihan telepon	40.000.000	21,98 kwh listrik, 11,55 M3 air dan 1 thn tagihan telepon	45.000.000	30,00 kwh listrik, 19,55 M3 air, dan 1 thn tagihan telepon	50.000.000	35,00 kwh listrik, 28 M3 air dan 1 thn tagihan telepon	55.000.000		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000	7 unit roda 4 dan 60 unit roda 2	20.000.000	7 unit roda 4 dan 60 unit roda 2	25.000.000	7 unit roda 4 dan 60 unit roda 2	30.000.000	7 unit roda 4 dan 60 unit roda 2	35.000.000		

					Penyediaan jasa Adm Keuangan		2 dok	20.000.000	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0					
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yanf disediakan	100 %	20.000.000	100 %	7.000.000	24 jenis	7.000.000	24 jenis	7.000.000	24 jenis	10.000.000	24 jenis	15.000.000				
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantior	100 %	95.000.000	100 %	75.285.500	40 jenis	75.285.500	40 jenis	75.000.000	40 jenis	80.000.000	40 jenis	85.000.000				
					Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah yang dicetak, jumlah barang yangh difoto copy, jumlah barang yang djilid	100 %	84.900.000	100 %	38.455.000	16 jenis, 16,680 lbr foto copy, 50 bh jilid	38.455.000	16 jenis, 21.680 lbr foto copy,5 0 bh jilid	40.000.000	16 jenis, 25.45 lbr foto copy, 50 bh jilid	45.000.000	16 jenis, 31.000 lbr foto copy, 50 bh jilid	50.000.000				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	16 jenis	10.000.000	16 jenis	10.000.000	16 jenis	15.000.000	16 jenis	20.000.000				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan (surat kabar)	5 surat kabar	6.000.000	6 surat kabar	6.000.000	8 surat kabar	6.000.000	8 surat kabar	7.000.000	8 surat kabar	9.000.000	8 surat kabar	12.000.000				
					Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan/min uaman rapat/tamu yang disediakan	100 %	47.022.500	100 %	42.207.400	1.700 porsi	42.217.400	2.171 bks	43.000.000	2.250 bks	45.000.000	2.500 bks	50.000.000				
					Penyediaan alat kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor		0		0		0		0	15 jenis	10.000.000	15 jenis	10.000.000				



					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	65 unit	20.000.000	65 unit	40.000.000	65 unit	50.000.000	65 unit	60.000.000			
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dsipelihara	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	84 unit	15.000.000	84 unit	25.000.000	84 unit	35.000.000	84 unit	45.000.000			
					Pemeliharaan rutin/berkala meubiler	Jumlah meubiler yang dipelihara		0		0		0		0	20 unit	15.000.000	20 unit	15.000.000			
					Pengadaan Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perelengkapan gedung kantor yang diadakan	4 unit	35.000.000	0	0	0	0	4 unit	50.000.000	5 unit	60.000.000	6 unit	70.000.000			
					Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhap	0	0	0	0	2 unit	55.941.826	3 unit	200.000.000	3 unit	190.000.000	3 unit	175.000.000			
					Pembangunan Turap dan Pagar	Jumlah turap/pagar yang dibangun		0		0		0		0	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000			
				Program	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Formal		24.000.000		20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000			

				Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Formal	1 thn	24.000.000	6 org	20.000.000	10 org	22.000.000	10 org	24.200.000	10 org	26.620.000	10 org	29.282.000			
				Program	Peningkatan Disiplin Aparatur			0		0		0		0	50 paket	25.000.000	0	0			
				Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas yang diadakan		0		0		0		0	50 paket	25.000.000	0	0			
				Program	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan yang disusun tepat waktu		15.000.000		25.000.000	2 dok	27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500			
				Kegiatan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	4 dok	15.000.000	3 dok	5.000.000	5 dok	7.500.000	3 dok	7.500.000	3 dok	8.275.000	3 dok	11.602.500			
				Kegiatan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan	0	0	2 dok	10.000.000	2 dok	10.000.000	2 dok	12.500.000	2 dok	12.500.000	2 dok	12.500.000			
				Kegiatan	Penyusunan Perencanaan Tahunan	Jumlah laporan	0	0	5 dok	10.000.000	5 dok	10.000.000	5 dok	12.500.000	5 dok	12.500.000	5 dok	12.500.000			



1	Terwujudnya keluarga berkualitas melalui pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	Laju pertumbuhan penduduk	Program	Keluarga Berencana	Rata-rata anak perkeluarga	2,9	1.188.598.000	2,7	1.738.230.000	2,5	2.307.400.000	2,4	2.600.000.000	2,2	2.900.000.000	2,1	3.200.000.000	2,1		
				Kegiatan	Pembinaan Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	68,86	146.823.000	69,08	189.790.000	70,00	294.582.500	70,65	353.102.500	71,05	413.102.500	71,08	428.102.500	70,09		
				Kegiatan	Penyelenggaraan bantuan operasional KB	Persentase penggunaan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		661.500.000		810.300.000		915.092.500		973.612.500		1.033.632.500		1.233.632.500			
				Kegiatan	Pengadaan sarana mobilitas Tim KB keliling	Tersedianya sarana mobilitas tim KB keliling		380.275.000		643.820.000		748.592.500		807.112.500		867.112.500		927.112.500			
				Kegiatan	Desiminasi kebijakan pengendalian penduduk	Terlaksananya sosialisasi kegiatan pengendalian penduduk		0		94.320.000		199.132.500		257.652.500		317.652.500		332.652.000			
				Kegiatan	Pelayanan KIE	Terlaksananya sosialisasi kegiatan kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga		0			600 org	150.000.000	600 org	208.520.000	600 org	268.520.000	600 org	278.500.000	600 org		
				Program	Pelayanan Kontrasepsi	prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR)	12,5	170.217.750	11,5	138.710.000	10,85	492.240.855,77	9,25	528.665.922,96	8,4	542.774.238	8	562.941.359,50			

				Kegiatan	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi ( unmeed need )	12,5	170.217.750	11,5	138.710.000	10,85	492.240.855,77	9,25	528.665.922,96	8,4	542.774.238	8	562.941.359,50	8,00		
		Meningkatnya pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi	Persentase kelahiran pada remaja (15-19 tahun)	Program	Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase remaja yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	0	58.295.000	35	57.550.000	40	150.000.000	45	200.000.000	50	250.000.000	55	300.000.000	55		
				Kegiatan	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Terlaksananya kegiatan penggalangan partisipasi masyarakat untuk kegiatan PIK-R dan pemeliharaan kesehatan reproduksi remaja	0	0			14 kec	90.000	14 kec	115.000	14 kec	130.000	14 kec	160.000.000	14 kec		
				Kegiatan	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi	Persentase Kelompok Pusat Informasi Konseling Rmaja (PIK-R) aktif	65	50.000	70	57.550.000	75	60.000.000	80	85.000.000	85	120.000.000	90	140.000.000	100		
		Meningkatnya pemberdayaan ketahanan keluarga	Persentase PUS anggota kelompok BKB,BKR, BKL dan UPPKS yang ber KB	Program	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Peningkatan kelompok BKB,BKR,B KL dan UPPKS yang mandiri	80	457.838.750	85	449.043.000	90	675.000.000	95	700.000.000	100	750.000.000	100	800.000.000	100		
				Kegiatan	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	persentase kelompok masyarakat peduli KB	80	457.838.750	85	449.043.000	90	675.000.000	95	700.000.000	100	750.000.000	100	800.000.000	100		

				Program	Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Terciptanya SDM yang berkualitas usia dini	30	700	35	40.000.000	40	65.000.000	45	80.000.000	50	100.000.000	55	125.000.000	139 klp			
				Kegiatan	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang dilatih	60 orang	700	35	40.000.000	40	65.000.000	45	80.000.000	50	100.000.000	55	125.000.000	139 klp			
				Program	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		0	0	60	45.000	75	100.000.000	80	150.000.000	85	200.000.000	90	250.000.000				
				Kegiatan	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Ke4sehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)				45.000	75	100.000.000	80	150.000.000	85	200.000.000	90	250.000.000				
2	Tenwujudnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	persentase swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program	peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Nagari	persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	30	763.413.000	35	518.752.000	40	710.863.691,03	45	798.510.876,68	50	859.530.499,97	55	965.527.227,23	55			

				Kegiatan	Evaluasi RPJM dan RKP Nagari	Terlaksannya fasilitas penyusunan RPJM dan RKP Nagari	0	0	0	0	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%		
				Kegiatan	pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	jumlah kelompok masyarakat yang dibina	75 Nagari	28.520			75 Nagari	40.000.000	75 Nagari	48.000.000	75 Nagari	54.000.000	75 Nagari	65.000.000	75 Nagari		
				Kegiatan	pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	persentase keikutsertaan masyarakat pada kegiatan musrenbang nagari		51.965		41.763.000		50.963.000		60.000.000		66.000.000		75.000.000			
				Kegiatan	Pemberian stimulasi pembangunan desa	jumlah SPMN yang diberi stimulasi	2 org	37.660		0	2 org	48.000	2 org	56.000.000	2 org	62.000.000	2 org	70.000.000	12 org		
				Kegiatan	Pembinaan Nagari Berprestasi	jumlah nagari yang berpartisipasi dalam lomba nagari	14	165.308	14	117.760.000	14	126.960.000	14	136.660.000	14	142.660.000	14	160.432.227,23	14		
				Kegiatan	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	terlaksananya pembinaan, fasilitas, raker dan pencanangan BBGRM - TMNN	75 Nagari	228.000	75 Nagari	131.685.000	75 Nagari	140.225.000	75 Nagari	149.585.000	75 Nagari	155.585.000	75 Nagari	165.000.000	75 Nagari		
				Kegiatan	Sosialisasi dan pembinaan kelompok pemberdayaan masyarakat	Terlaksannya pembinaan, koordinasi, monitoring kegiatan PAMSIMAS, Rakor, dan	80%	48.110	80%	47.895.000	85%	57.095.000	90%	66.095.000	95%	72.095.000	100%	80.095.000	100%		

						Workshop Asosiasi BP-SPAMS Luhak Nan Tuo															
				Kegiatan	Pembinaan LPM	Jumlah LPM Aktif	90 lembaga	109.290	90 lembaga	50.000.000	90 lembaga	86.960.691,03	90 lembaga	98.170.876,68	90 lembaga	117.190.499,97	90 lembaga	130.000.000	90 lembaga		
				Kegiatan	peningkatan dan fasilitasi operasional profil dan data nagari	Terlaksannya afasilitasi, pembinaan, sosialisasi, Bintek, dan Rakernis pendayagunaan data profil Nagari	75 Nagari	71.030	75 Nagari	30.000.000	75 Nagari	45.000.000	75 Nagari	50.000.000	75 Nagari	55.000.000	75 Nagari	65.000.000	75 Nagari		
				Kegiatan	Pembinaan nagari percontohan	Terlaksananya pembinaan nagari percontohan			14 nagari	76.730.000		0		0		0		0			
				Kegiatan	Koordinasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata -Proses Pembelajaran Masyarakat (KKN-PPM)	Terlaksannya kegiatan dan penempatan Mahasiswa KKN PPM serta terlaksannya monitoring dan evaluasi KKN PPM	80%	23.530	80%	22.919.000	85%	35.000.000	90%	40.000.000	95%	45.000.000	100%	55.000.000	100%		

		meningkatkan kehidupan adat sosial budaya masyarakat yang mantap	persentase lembaga adat dan sosial budaya masyarakat yang aktif	Program	Pengembangan Nilai Budaya	meningkatkan upaya pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat				50%	254.607.339,39	67	259.999.684,24	85%	254.425.424,46	100%	259.819.089	100%			
				Kegiatan	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya tugas dan fungsi Pokja Pelestarian dan pengembangan adat istiadat	80	92.915		85%	165.000	85%	175.000	90%	195.000	95%	210.000	100%			
		meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa	persentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa	Program	pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan	persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembangan ekonomi pedesaan	15	388.890.000	45	305.279.500	50	1.043.890.090,09	55	1.172.598.350,42	60	1.262.204.530,75	65	1.417.858.750,58	65		
				Kegiatan	Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna ( TTG )	jumlah kelompok TTG yang aktif	14 Posyantek	142.890	14 Posyantek	99.865.000	14 Posyantek	280.090.590,69	14 Posyantek	300.000.000	14 Posyantek	310.000.000	14 Posyantek	340.000.000	14 Posyantek		
				Kegiatan	Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	jumlah kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang aktif	40	119.000	50	73.630.000	60	155.000.000	75	172.000.000	75	180.000.000	75	200.000.000	75		
				Kegiatan	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Terlaksananya LKPN			14 Kec	64.985.000		127.000.000		145.000.000		150.000.000		175.000.000			

				Kegiatan	Fasilitasi dan pembinaan Lembaga Ekonomi masyarakat pedesaan (pasar nagari, CPPMN)	jumlah kelompok lembaga ekonomi masyarakat pedesaan yang difasilitasi	14 kec	127.000	14 kec	66.799.500	14 kec	171.799.500	14 kec	190.000.000	14 kec	232.204.530,75	14 kec	262.858.750,58	14 kec		
				Kegiatan	Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan	terlaksannya pelatihan usaha industri kerajinan	0	0		0		100.000.000		118.000.000		125.000.000		140.000.000			
				Kegiatan	Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa (Bumnag)	terlaksannya pelatihan usaha manajemen usaha milik desa (Bumnag)	0	0	0	0	75 Nagari	105.000.000	75 Nagari	124.298.350,42	75 Nagari	135.000.000	75 Nagari	150.000.000	75 Nagari		
				Kegiatan	Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UED, UEMSP, SPP)	Terlaksannya pembinaan Usaha Kecil dan menengah (UED, UEMSP, SPP)	0	0		0		105.000.000		123.300.000		130.000.000		150.000.000			
		meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan		Program	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase kontribusi masyarakat dalam pembangunan	25	3.416.347.000	40	2.726.826.000	55	3.742.727.886,13	60	4.204.194.085,67	65	4.525.465.024,89	70	5.083.542.349,66	70	17.555	929.346,35
				Kegiatan	Sosialisasi dan temu kader Posyandu	Terfasilitasinya transportasi kader Posyandu, penilaian dan peningkatan SDM Kader	2.995 org	1.169.035	2.995 org	1.340.065.000	2.995 org	500.000.000	2.995 org	600.000.000	2.995 org	660.000.000	2.995 org	850.000.000	2.995 org		

					dan pengelola Posyandu Kab. Tanah Datar																
				Kegiatan	Sosialisasi, pembinaan dan orientasi PMT-AS	Jumlah murid SD/MIS yang mendapat program PMT-AS	800	295.000			1100	600.000.000	1250	700.000.000	1400	775.000.000	1500	900.000.000	1500		
				Kegiatan	Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat	Terfasilitasi dan terlaksannya kegiatan 10 program pokok PKK	80%	1.075.702	85%	1.038.906.000	90%	1.500.000.000	95%	1.600.000.000	100%	1.660.000.000	100%	1.850.000.000	100%		
				Kegiatan	Fasilitasi pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya Bintek, Workshop, sosialisasi, rakor, rakornis dan monev pelaksanaan pembangunan masyarakat desa	75 nagari	876.610	75 nagari	347.855.000	75 nagari	1.000.000.000	75 nagari	1.100.000.000	75 nagari	1.160.000.000	75 nagari	1.200.000.000	75 nagari		
				Kegiatan	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	0	0	0	0		142.727.886,13		204.194.085,067		270.465.024,89		283.542.349,66			



3.	Terselenggaranya pemerintahan desa/nagari yang baik dan bersih	Terciptanya tata kelola pemerintahan nagari yang baik dan bersih		Program	Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa	persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	0	0	25	633.691.100	45	1.500.000.000	55	2.500.000.000	60	1.250.000.000	65	1.250.000.000	65		
				Kegiatan	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa yang dilatih	0	0	75 org	257.042.500	75 org	350.000.000	239 org	600.000.000	239 org	300.000.000	239 org	300.000.000	1195 org		
				Kegiatan	pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	Jumlah aparatur pemerintahan desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan yang dilatih	0	0	0	0	75 org	240.000.000	164 org	500.000.000	164 org	200.000.000	164 org	200.000.000	820 org		
				Kegiatan	Penilaian Kompetensi Wali Nagari	Terlaksananya penilaian kompetensi Wali Nagari	0	0	75 Nagari	133.660.000	75 nagari	230.000.000	75 nagari	350.000	75 nagari	180.000.000	75 nagari	150.000	75 nagari		
				Kegiatan	Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi	0	0	75 KAN	92.451.000	75 KAN	180.000.000	75 KAN	300.000.000	75 KAN	150.000.000	75 KAN	200.000	75 KAN		

				Kegiatan	Penilaian kompetensi Sekretaris Nagari	Terlaksanan ya penilaian kompetensi Sekretaris Nagari	0	0	0	13.160.000	75 Seknag	180.000.000	75 Seknag	300.000.000	75 Seknag	150.000.000	75 Seknag	150.000.000	75 Seknag		
				Kegiatan	Penilaian BPRN	Terlaksanan ya penilaian BPRN	0	0	0	0	75 BPRN	175.000.000	75 BPRN	300.000.000	75 KAN	150.000.000	75 BPRN	150.000.000	75 BPRN		
				Kegiatan	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Terlaksanan ya Monev penyelenggaraan pemerintahan nagari	0	0	75 Nagari	137.317.600	75 Nagari	145.000.000	75 nagari	150.000.000	75 nagari	120.000.000	75 nagari	120.000.000	75 nagari		
				Program	Kerjasama pembangunan	Meningkatn ya kerjasama nagari dengan dunia usaha/lembaga	0	0	0	0		500.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000			
				Kegiatan	Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha	Terlaksanan ya penyusunan dan sosialisasi peraturan tentang kerjasama desa	0	0	0	0	1 peraturan	500.000.000		875.000.000		1.350.000.000		1.850.000.000			
				Kegiatan	Monev	Terlaksanan ya Monev		0	0	0		100.000.000		125.000.000		150.000.000		150.000.000			

				Program	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desda/nagari	Pengelolaan aset nagari	0	0	0	0	75 nagari	175.000	75 nagari	250.000	75 nagari	300.000	75 nagari	400.000	75 nagari			
				Kegiatan	Pengelolaan Aset nagari	Terlaksananya pengelolaan aset desa/nagari	0	0	0	0	75 Nagari	175.000	75 nagari	250.000	75 nagari	300.000	75 nagari	400.000	75 nagari			
				Program	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Produk hukum peraturan perundang undangan	0	0	0	0		2.400.000.000		1.600.000.000		1.200.000.000		800.000.000				
				Kegiatan	Kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Terlaksananya kajian hukum produk perundang-undangan	0	0	0	0	14 bh	2.000.000.000		1.300.000.000		900.000.000		500.000.000				
				Kegiatan	Sosialisasi produk hukum	Terlaksananya sosialisasi produk hukum	0	0	0	0	75 Nagari	400.000.000	75 nagari	300.000.000	75 nagari	300.000.000	75 nagari	300.000.000	75 nagari		Pemdes	



				Program	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	0	0	0	0	0	25	76.382.201,76	45	85.799.879,30	55	92.356.429,08	60	103.745.762,24	60		
				Kegiatan	Pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	0	0	0	0	0	25	76.382.201,76	45	85.799.879,30	55	92.356.429,08	60	103.745.762,24	60		

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR**

Peraturan Bupati Tanah Datar  
Nomor : 45 tahun 2016  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  
: Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

